2024

LAPORAN KINERJA

KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan dalam Tahun 2024, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dan merupakan realisasi capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2024, diharapkan Dinas Perhubungan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs. Asban Aris, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19660224 199412 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan Akutabilitas Perangkat Daerah”:

   - Diukur dengan indikator sebagai berikut :

     a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Formulasi Perhitungan :

     Formulasi Pengukuran :
     Nilai SAKIP Perangkat Daerah

   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 77; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 77,75. Dengan demikian capaian ini melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”:

   - Diukur dengan indikator sebagai berikut :

     a. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun}} \times 100\%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 23,21%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 20,25%. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 91,53%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran”:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan, Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :
Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n) X 100%
Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun

b. Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan, Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :
Jumlah Rute Pelayaran yang terfasilitasi terbangun (tahun n) X 100%
Jumlah Rute Pelayaran yang terfasilitasi selama 5 tahun

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Pengelolaan Pelayaran

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 26,28%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 26,28%. Dengan demikian capaian ini mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
2. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.

3. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 2
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur 2
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 3
1.3 Isu-isu Strategis 3
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 4
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 12
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2023 13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 20
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 23
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2023 25
3.3. Realisasi Anggaran 31
BAB IV PENUTUP 33
LAMPIRAN-LAMPIRAN 35

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 4
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 8
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023 10
Tabel II.1 Sasaran Strategis PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 12
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 12
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 13
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan Tahun 2023 21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 23
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 24
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 25
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja 26
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 31

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja 2
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3
Gambar II.1. Sistem Integrasi DPA, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 20
Gambar II.2. Website PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3
Gambar II.3. Layanan Pengaduan Melalui Website PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :
Cascading Kinerja
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
Isu-Isu Strategis
Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

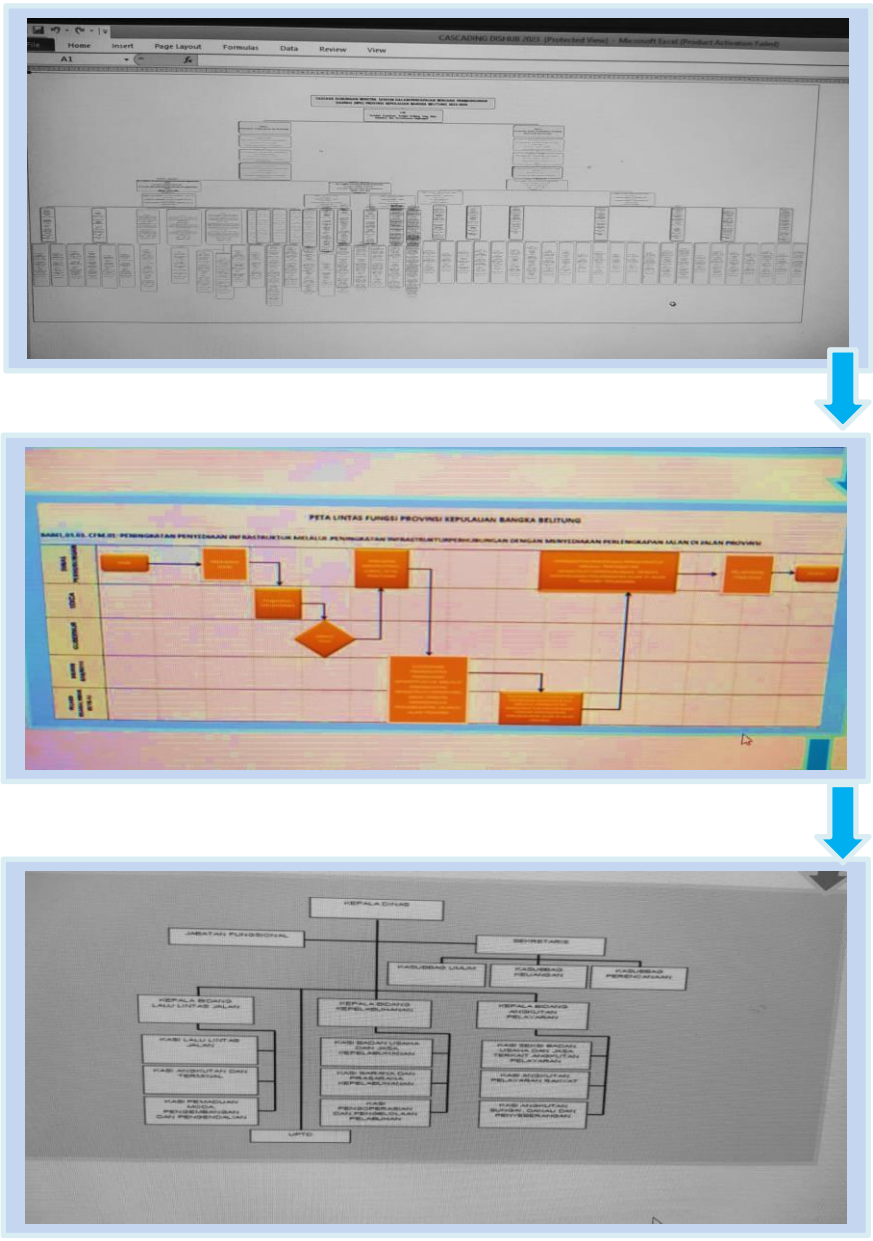

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang non Pelayanan Dasar. Adapun PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaan administrasi Dinas Perhubungan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PETA JABATAN	
Jabatan Struktural/Fungsional	**Jabatan Pelaksana**
Jabatan Struktural : **Esselon II : 1 Esselon** **III : 4 Esselon IV : 9** **Jabatan Fungsional : 3** **Jabatan Fungsional Tertentu : 1**	**Jabatan Pelaksana : 46**

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi PD Dinas

Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur", antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penggunaan teknologi informasi untuk pengidentifikasian capaian dan progres kinerja;
2. Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan dan kecelakaan pada ruas jalan pusat-pusat ekonomi;
3. Jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang masih tinggi yang diakibatkan oleh masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan serta pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan;
4. Belum optimalnya pembangunan konektivitas sektor perhubungan di pulau-pulau berpenduduk sehingga belum mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1/D4	D3		S3	S2	S1/D4	D3		
A	**JABATAN STRUKTURAL**												
1	KEPALA DINAS	1			1		1		1			1	
2	SEKRETARIS	1			1		1		1			1	
3	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1			1		0			0		0	
4	KEPALA BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN	1					1		1			1	
5	KEPALA BIDANG KEPELABUHANAN	1			1		0			0		0	
6	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	1			1		1			1			1
7	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	1					1		1			1	
8	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	1					1		1				1
9	KEPALA SEKSI LALU LINTAS JALAN	1			1		1			1		1	

10	KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA, PENGAMBANGAN DAN PENGENDALIAN	1			1		1			1		1	
11	KEPALA SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT	1			1		1		1			1	
12	KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1			1		1			1		1	
13	KEPALA SEKSI BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN	1			1		1		1			1	
14	KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN	1			1		1			1			1
B	**JABATAN FUNGSIONAL**												
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	3			3		2			2		2	
2	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	1			1		1			1		1	
3	PENGELOLA BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA	1			1		0						
4	ARSIPARIS TERAMPIL	1			1		0						
5	ANALISA KEPEGAWAIAN PERTAMA	1			1		0						
6	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1			1		0						
C	**JABATAN PELAKSANA**												
1	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	1			1		1			1		1	
2	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	1			1		0						
3	PENGADMINSTRASI UMUM	1				1	2				2	2	
4	PENATA LAPORAN KEUANGAN	3			3		3			3			3
5	PENGADMINSTRASI KEUANGAN	1			1		1			1		1	
6	BENDAHARA	1			1		0						
7	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	3			3		3			3		2	1
8	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1			1		0						
9	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	1			1		1			1		1	
10	PENGAWAS LALU LINTAS DARAT	3			3		2			2		2	

11	ANALIS TEKNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1			1		1			1		1	
12	PENGAWAS TRANSPORTASI	1			1		1			1		1	
13	PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS	2				2	2				2	2	
14	PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	3				3	3				3	3	
15	ANALIS RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI DARAT	3			3		3			3		1	2
16	ANALIS LALU LINTAS	2			2		2			2		2	
17	ANALIS RENCANA UMUM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI DARAT	1			1		1			1			1
18	PENGAWAS KESELAMATAN DARAT	1			1		1			1		1	
19	PEMERIKSA LALU LINTAS DARAT	2			2		2			2		2	
20	PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT	1			1		1			1		1	
21	TEKNISI SURVEY JARINGAN TRANSPORTASI	1				1	1				1	1	
22	PENGELOLA SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARAN JALAN	1				1	1				1	1	
23	PENGELOLA PENGAWASAN LLAJ	2				2	1				1	1	1
24	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2				2	2				2	2	
25	PENGELOLA SARANA ANGKUTAN	1				1	1				1		1
26	ANALIS ANGKUTAN DARAT	1			1		1			1			1
27	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	2			2		2			2		1	1
28	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN	1			1		1			1		1	
29	PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN	1				1	0						
30	PENGAWAS PELABUHAN	2			2		1			1		1	
31	ANALIS PERIZINAN TRANSPORTASI	2			2		2			2			2
32	PENGELOLA PERIZINAN	2				2	2				2	2	
33	ANALIS PELABUHAN	3			3		2			2		1	1
34	PENGELOLA DATA	1				1	1				1	1	
35	PEMERIKSA PELABUHAN	1			1		1			1		1	

36	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	1				1	0						
37	PENYUSUN KINERJA JARINGAN TRANSPORTASI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	3			3		3			3		3	
38	PENGELOLA LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1				1	0						
39	PENGADMINSTRASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1				1	1				1	1	
40	ANALIS PELAYARAN	2			2		1			1		1	
41	PENGELOLA KESELAMATAN DAN KEMANAAN KAPAL SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1				1	1				1	1	
42	PENYUSUN TEKNIS IJIN OPERASI PELABUHAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	1			1		0						
43	PRAMU BAKTI	3				3	3				3		3
44	PRAMU KEBERSIHAN	6				6	6				6	5	1
45	PETUGAS KEAMANAN	4				4	4				3	3	
46	PENGEMUDI	4				4	4				4	4	
JUMLAH		105	0	0	64	38	70	0	7	49	17	56	17

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan belum merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 50 orang (56%), disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 16 orang (18%) dan SLTA sebanyak 16 orang (18%) ,S2 sebanyak 10 orang (8%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak laki-laki. Hal ini menunjukkan belum adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

NO	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	**TANAH**	4	Rp 61.737.396,00
	TANAH	4	Rp 61.737.396,00
2	**PERALATAN DAN MESIN**	**10.381**	**Rp 93.728.550.796,81**
	ALAT BESAR	8	Rp1.353.321.500,00
	ALAT ANGKUTAN	20	Rp3.323.358.250,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	46	Rp872.215.800,00
	ALAT PERTANIAN	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	650	Rp7.895.623.784,94
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	79	Rp541.496.800,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	3	Rp 3.593.461.990,00
	ALAT LABORATORIUM	8	Rp30.585.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	85	Rp27.140.000,00
	KOMPUTER	126	Rp842.741.000,00
	ALAT EKSPLORASI	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	Rp13.330.200,00
	ALAT PERAGA	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
	RAMBU – RAMBU	9354	Rp75.235.276.471,87
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**319**	Rp33.986.864.360,45
	BANGUNAN GEDUNG	319	Rp33.986.864.360,45
	MONUMEN	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0

	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0
4	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**469**	**Rp76.828.737.793,00**
	JALAN DAN JEMBATAN	460	Rp74.594.529.000,00
	BANGUNAN AIR	4	Rp1.203.017.000,00
	INSTALASI	4	Rp 1.016.266.793,00
	JARINGAN	1	Rp14.925.000,00
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**521**	**Rp765.186.000,00**
	BAHAN PERPUSTAKAAN	516	Rp499.575.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0
	HEWAN	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0
	TANAMAN	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	5	Rp265.611.000,00
6	**KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**4**	**Rp668.915.381,00**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	4	Rp668.915.381,00
7	**ASET LAINNYA**	75	**Rp8.089.769.803,00**
	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
	ASET TIDAK BERWUJUD	10	Rp1.210.000.000,00
	ASET LAIN-LAIN	65	Rp.6.879.769.803,00
TOTAL		**11.773**	**Rp 216.549.845.581,55**

Kendaraan operasional PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 10 unit kendaraan operasional, 8 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak 20% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 80% berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	25.525.871.149	29.156.303.300	-	-	54.682.174.449
2024	19.294.146.261,05	583.464.198	-	-	19.877.610.459.05

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2024 terdapat penurunan anggaran belanja sebesar Rp 34.804.563.989,95 Hal ini menunjukkan ada penurunan anggaran untuk membiayai program/kegiatan PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya untuk belanja infrastruktur Perhubungan.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Apresiasi
1.	Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/187/LHR/REV-ITDA/2024 tanggal 06 September 2024 perihal Laporan Hasil Reviu Rencana Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 : Rekomendasi: 1. Tidak Ada	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat dan pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :
Tujuan,
Sasaran dan
Indikator Kinerja OPD
Strategi dan Arah
Kebijakan
Struktur Program
dan Kegiatan Tahun
2024

Renstra PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD 2023 - 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 - 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan

Adapun sasaran PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	74	76	77	78	80	80
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	10	15,16	23,21	30,98	40	40
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan	%	5	13,35	26,28	37,65	60	60

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ	Meningkatkan,pemeliharaan Dan pembangunan sarana Prasarana perhubungan
3.	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Meningkatkan, pemeliharaan Dan pembangunan sarana Prasarana perhubungan Kepelabuhanan

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

42	Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.084.970.987	14.614.030.911	470.940.067
		1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.125.690,00	262.518.962,00	1.606.728
		1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185.732.760,00	184.126.032,00	1.606.728
		2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.392.930,00	78.392.930,00	0
		2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.438.628.841,00	10.476.972.393,05	38.343.552
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.438.628.841,00	10.476.972.393,05	38.343.552
		3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	474.998.400,00	256.000.000,00	218.998.400
		1 Sub Kegiatan Pengadaan Dinas Beserta Kelengkapannya	218.998.400,00	-	218.998.400,00
		2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.000.000,00	121.000.000,00	0

				3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	135.000.000,00	135.000.000,00	0
			4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.019.959.056,00	931.667.556,00	88.291.500
				1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.999.900,00	33.288.400,00	11.711.500
				2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.999.900,00	-	215.999.900,00
				3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	246.999.700,00	220.457.600,00	26.542.100
				4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.956,00	34.961.956,00	38.000
				5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	97.994.600,00	97.994.600,00	0
				6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000,00	35.000.000,00	0
				7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.965.000,00	509.965.000,00	166.000.000
			5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.458..763.610	1.643.700.000,00	1.029.541.000,00
				1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000
				2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	921.000.000,00	420.341.000,00	500.659.000
				3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	-	28.000.000,00
				4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.700.000,00	603.200.000,00	82.500.000

			6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.243.559.000,00	1.657.331.000,00	413.772.000
				1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	454.000.000,00	454.000.000,00	0
				2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.560.000,00	199.540.000,00	50.020.000
				3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.999.000,00	823.791.000,00	523.792.000
				4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000,00	180.000.000,00	60.000.000
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ	2	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		8.008.572.498	3.036.572.298	4.972.000.200
			1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	7.387.105.700,00	2.549.679.500,00	4.837.426.200
				1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.633.605.700,00	246.179.500,00	5.387.426.200
				2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.753.500.000,00	2.303.500.000,00	550.000.000
			2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	150.000.000,00	0	150.000.000,00
				1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	150.000.000,00	0	150.000.000,00
			3	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	21.813.700,00	37.800.200,00	15.986.500

				1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	21.813.700,00	37.800.200,00	15.986.500
			4	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		269.046.200	46.638.700,00	46.638.700,00
				1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	46.638.700,00	46.638.700,00	0
			5	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		49.999.636	34.369.800,00	34.369.800,00
				1	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	34.369.800,00	34.369.800,00	0
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	3	Program Pengelolaan Pelayaran			3.888.096.750	2.227.007.250	1.661.089.500
			1	Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan		269.120.500,00	269.120.500,00	0
				1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	24.910.500,00	24.910.500,00	0
				2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas	77.999.700,00	77.999.700,00	0

				3	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota	166.210.300,00	166.210.300,00	0
			2	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		595.651.850,00	446.091.850,00	149.560.000
				1	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	595.651.850,00	446.091.850,00	149.560.000
			3	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1.315.867.500,00	115.367.500,00	1.200.500.000
				1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	115.367.500,00	115.367.500,00	1.200.500.000
			4	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		721.993.500,00	722.004.000,00	10.500
				1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	721.993.500,00	722.004.000,00	10.500

			5		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	341.988.500,00	330.948.500,00	11.040.000
				1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Regional	283.997.700,00	273.607.700,00	10.390.000
				2	Penetapan Kebijkan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Regional	39.997.200,00	39.347.200,00	650.000
				3	Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Regional	17.993.600,00	17.993.600,00	0

			6	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	25.709.900,00	35.709.900,00	10.000.000
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	25.709.900,00	35.709.900,00	10.000.000
			7	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	59.240.700,00	79.240.700,00	20.000.000
				1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang , Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	33.246.600,00	53.246.600,00	20.000.000

				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang , Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25.994.100,00	25.994.100,00	0
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran						26.981.640.235	19.877.610.459	7.104.029.776

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.084.970.987	14.614.030.911	470.940.067
	Total Anggaran Pendukung	15.084.970.987	14.614.030.911	470.940.067

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	Triwulan I	0
					Triwulan II	77,75
					Triwulan III	77,75
					Triwulan IV	77,75
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	23,21%	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	23,21%
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	%	26,28%	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	26,28%

Pada tahun 2024, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2024 adalah sebagai berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	Triwulan I	0
					Triwulan II	77,75
					Triwulan	77,75
					Triwulan IV	77,75
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	23,21%	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	23,21%
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	%	26,28%	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan	0
					Triwulan IV	26,28%

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran berkurang 26,32 % sehubungan adanya Refocussing Anggaran.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

BAB 3

Bab 3 Berisi :
Capaian Kinerja Tahun 2023
Realisasi Anggaran
Inovasi
Lintas Sektor

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Tat Kelola Internal Perangkat Daerah	Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Formula Perhitungan: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	77,65	77	77,75	100	Tinggi	80
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indikator: Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Formula Perhitungan: Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n) X 100% Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun	%	10	14,25	23,21	20,25	87,24	Tinggi	40
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Indikator: Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan Formula Perhitungan: Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n) X 100% Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selam 5 tahun	%	5	13,35	26,28	26,28	100	Tinggi	60

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n) X 100% Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n) X 100% Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun

Kinerja sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n) / Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun dikalikan 100 persen Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 20,25% dari target 23,25%. dan Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan

terbangun (tahun n) Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun dikalikan 100 persen. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 26,28% dari target 26,28%. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ	10	23,21	20,25	87,24	40	87,24
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	5	26,28	26,28	100	60	100

- Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 87,24% dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 23,21% belum melampaui.

b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan

capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

Sasaran dari Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

formula perhitungan indikator ini adalah

Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n) _ X 100%

Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah (20,25/23,21)x100%= 87,24% dari target 20,25%.

- Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 100 % , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 87,4% sudah melampaui.
b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan

capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

Sasaran dari program Program Pengelolaan Pelayaran yaitu Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan dengan Indikator *Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan.*

formula perhitungan indikator ini adalah

Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n)X100%Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran .

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah (26,28/26,28)x100%= 100% dari target 26,28%.

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	***Persentase Pemenuhan Infrastruktu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)***	23,21	20,25	91,53
2	***Persentase Pemenuhan Infrastruktu Pelabuhan***	26,28	26,28	100

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Survei Kepuasan Layanan Transportasi Tahun Anggaran 2024
2.		Rehabilitasi Sarana bantu Navigasi Pelayaran Tahun 2024 di Wilayah Perairan Kepulauan Bangka Belitung
3		Rehabilitasi Perlengkapan Jalan

4		Survei Ramp Check, Razia Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) di Jalan Provinsi
5		Sosisalisasi Tarif Penyeberangan dan Tata Cara Pembelian Tiket Ferry Online serta Informasi Sekolah Kedinasan Poltektrans SDP dan Posko Mudik Lebaran 1445H / 2024 dan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Adanya mekanisme Bantuan Teknis (Bantek) dalam penganggaran di Kementerian Perhubungan, sehingga kebutuhan prioritas Pemerintah Provinsi dapat diakomodir melalui APBN walaupun kebutuhan tersebut bukan kewenangan kementerian.

b. Ketersediaan beberapa jenis Fasilitas Perlengkapan jalan dalam e-katalog Nasional maupun sektoral sehingga mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.

c. Penyusunan Dokumen KKRL (Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut) di 2 Lokasi Pelabuhan Bakit dan Mantung, Penetapan Lintas berupa SPM Kapal, Penetapan Tarif berupa Posko dan Pengawasan di Pelabuhan Tanjung Sadai – Tanjung Ru, Tanjung Api Api – Tanjung Kalian, Tanjung Ru – Tanjung Nyato

d. Proses penyusunan dokumen pembangunan Pelabuhan telah dipedomani bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian.

Faktor Penghambat keberhasilan

a. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
b. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.
c. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan.

1.1 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ	23,21 %	20,25%	91,53%	Rp 3.036.572.298	Rp 2.724.760.323	89,73%	Rp 311.811.975
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	26,28%	26,28%	100%	Rp 2.227.007.250	Rp 1.580.066.940	70,95%	Rp 646.940.310
Jumlah									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	-	-	Rp 14.614.030.911	Rp 13.774.178.454	94,25%	Rp 839.852.457
Total Belanja Langsung						Rp 19.877.610.459	Rp 18.079.005.716,99	90,95%	Rp 1.798.604.742,06

Sumber: *http:SIPD*, *Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Dinas Perhubungan .Provinsi Kepulauan Bengka Belitung Th 2024, Laporan Keuangan PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 19.877.610.459, terealisasi Rp 18.079.005.716,99 atau 90,95% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 1.798.604.742,06 yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi sewa tempat
- Efisiensi biaya makanan dan minuman

1.2 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan aplikasi kinerja.
b. SIPELTAN (Sistem Pelaporan dan Pencatatan) khusus untuk Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :
Kesimpulan
Rekomendasi
Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
2. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.
3. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

1. Adanya mekanisme Bantuan Teknis (Bantek) dalam penganggaran di Kementerian Perhubungan, sehingga kebutuhan prioritas Pemerintah Provinsi dapat diakomodir melalui APBN walaupun kebutuhan tersebut bukan kewenangan kementerian.
2. Ketersediaan beberapa jenis Fasilitas Perlengkapan jalan dalam e-katalog Nasional maupun sektoral sehingga mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.
3. Penyusunan Dokumen KKRL (Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut) di 2 Lokasi Pelabuhan Bakit dan Mantung, Penetapan Lintas berupa SPM Kapal, Penetapan Tarif berupa Posko dan Pengawasan di Pelabuhan Tanjung Sadai – Tanjung Ru, Tanjung Api Api – Tanjung Kalian, Tanjung Ru – Tanjung Nyato.
4. Proses penyusunan dokumen pembangunan Pelabuhan telah dipedomani bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan mekanisme pendanaan melalui Bantuan Teknis (Bantek) Kementerian Perhubungan.
2. Adanya komitmen bersama dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap percepatan pembangunan pelabuhan ,
3. Menyusun skala prioritas pembangunan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tujuan dan Sasaran PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15,16	23,21	30,98	40
		Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	5,52	10,64	15,27	20
2	Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	76	77	78	80

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Drs. ASBAN ARIS, MH
Jabatan	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	SUGITO
Jabatan	:	Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PANGKALPINANG, NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA, Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,	PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS,
SUGITO	Drs. ASBAN ARIS, M.H. PEMBINA UTAMA MADYA/(IV/d) NIP. 19660224 199412 1 003

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2024

Scan Dokumen LHE Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

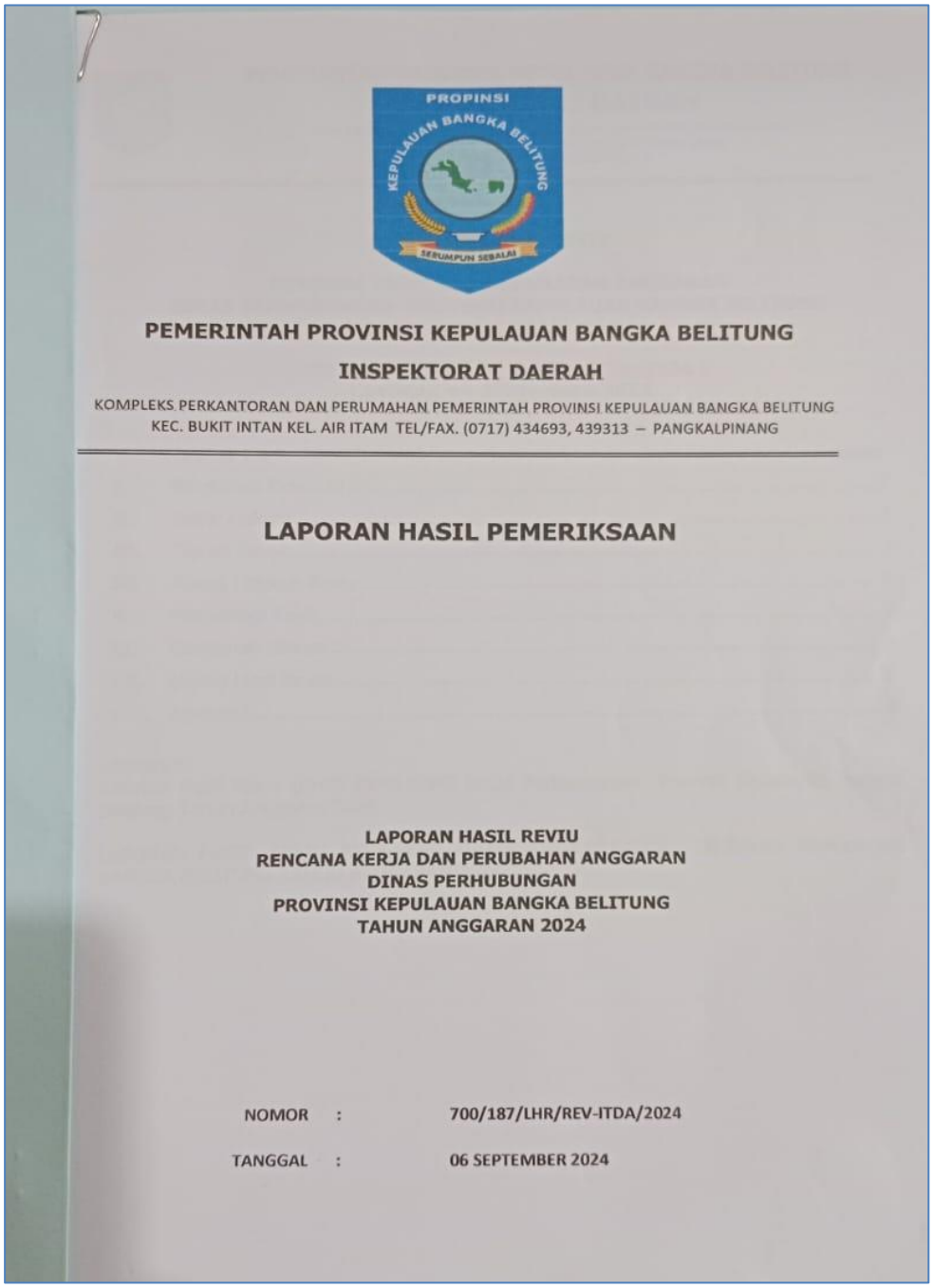

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 700/187/LHR/REV-ITDA/2024

TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2024

2) Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah; dan
3) Batas minimal kapitalisasi aset.

m. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;

n. Penganggaran belanja modal agar menggunakan sistem *full costing*. Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga belanja aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan (*full costing*), seperti:
   1) Biaya transportasi, biaya uji coba dan lain-lain;
   2) Belanja perjalanan dinas dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya;
   3) Biaya konsultan perencana, konsultan pengawas dan pengembangan perangkat lunak (*software*) harus ditambahkan pada nilai perolehan.

o. Kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

p. Dalam penyusunan RKPA-SKPD/RKPA-PPKD harus mencantumkan Sumber Pendanaan sesuai dengan peruntukannya (DAU, DBH, DAK, DID, PAD, PINJAMAN).

3. Program RKPA Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yaitu:

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
I	**DINAS PERHUBUNGAN**	**19.891.035.459,00**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.627.455.911,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.036.572.298,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.227.007.250,00

VII. URAIAN HASIL REVIU

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen
   Berdasarkan hasil reviu atas kelengkapan dokumen, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan telah didukung dengan data yang lengkap.

2. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada RKPA-SKPD yang tidak terdapat dalam PPAS Perubahan.
   Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada RKPA Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pendapatan daerah yaitu:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
      1) Pajak daerah provinsi
         Tidak terdapat pendapatan pajak daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
      2) Retribusi
         Tidak terdapat retribusi pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
      3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
         Tidak terdapat pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
      4) Lain-lain PAD yang sah
         Tidak terdapat pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   b. Pendapatan transfer
      1) Transfer pemerintah pusat
         Tidak terdapat pendapatan dari transfer pemerintah pusat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
      2) Transfer antar daerah
         Tidak terdapat pendapatan dari transfer antar daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
      Tidak terdapat pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran belanja daerah yaitu:
   a. Rencana belanja operasi dalam RKPA-SKPD
      Berdasarkan hasil reviu, kesesuaian rencana belanja operasi dalam RKPA-SKPD dengan KUPA-PPAS Perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
      1) Belanja operasi dalam RKPA Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan.
      2) Biaya pemeliharaan kendaraan telah sesuai dengan jumlah kendaraan dinas sesuai dengan daftar BMD;
      3) Besaran biaya operasi untuk pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
      4) Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran *(output)* kegiatan telah memperhatikan asas kepatuhan dalam pengalokasian anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
   b. Rencana belanja modal dalam RKPA-SKPD
      Berdasarkan hasil reviu, kesesuaian recana belanja modal dalam RKPA-SKPD dengan KUPA-PPAS Perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
      1) Belanja modal dalam RKPA Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan;
      2) Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran *(output)* kegiatan telah memperhatikan asas kepatuhan dalam pengalokasian anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

c. Rencana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam RKPA-SKPD
Tidak terdapat rencana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

d. Rencana belanja transfer dalam RKPA-SKPD
Tidak terdapat rencana belanja transfer pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pembiayaan daerah
   a. Kebijakan penerimaan pembiayaan
   Tidak terdapat alokasi anggaran pembiayaan daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
   Tidak terdapat alokasi anggaran pembiayaan daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Kesesuaian/ketidaksesuaian hasil reviu atas rancangan RKPA-SKPD Tahun 2024 dengan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Catatan Hasil Reviu.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat dan pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

Pangkalpinang, 06 September 2024

Plt. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.Si
NIP. 196705051992031009

8

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pulau Belitung Nomor 3 Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33149
E-mail: inspektorat@babelprov.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Disusun oleh/Tanggal	Farah Naaz, S.E 26 Agustus s.d. 03 September 2024
	Direviu oleh/Tanggal	Yunie Anastasia, S.E. 03 September 2024
	Disetujui oleh/Tanggal	Eli Apriyanti, S.E. 03 September 2024

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/21.a/REV-ITDA/2024 tanggal 23 Agustus 2024 untuk melaksanakan reviu Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

I. RKPA SKPD

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Perkada RKPD	Ada	-	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	-
2	Rancangan akhir KUPA PPAS Perubahan	Ada	-	Buku KUPA APBD TA 2024 dan PPAS Perubahan TA 2024	-
3	RKPA SKPD	Ada	-	Dokumen RKPA SKPD	-
4	Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKPA SKPD	Ada	-	Surat Edaran Gubernur Nomor: 903/2/Gubernur tentang Pedoman Penyusunan & Penyampaian Rencana Kerja & Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024	-
5	Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya	Ada	-	Dokumen RKPA SKPD	-
6	Capaian kinerja	Ada	-	Laporan Kinerja	-
7	Indikator kinerja	Ada	-	IKU	-
8	Analisa Standar Belanja	-	Tidak	Keputusan Gubernur Nomor: Keputusan Gubernur Kep Babel tentang atas Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemprov Kep Babel TA 2024 Perubahan masih dalam bentuk draft	-
9	Standar Harga Satuan (SHS)	Ada	-	Keputusan Gubernur Kep Babel Nomor: 188.44/360/BAKUDA/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2024	-
10	Standar Kebutuhan Barang	Ada	-	Keputusan Gubernur Kep Babel Nomor: 188.44/360/BAKUDA/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi	-

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
				Kepulauan Bangka Belitung TA 2024	
11	Perencanaan Kebutuhan BMD	Ada	-	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/91/BAKUDA/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024	-
12	Standar Pelayanan Minimal	-	-	-	-
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman penyusunan APBD	Ada	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	-
14	Jumlah pegawai dan struktur organisasi satuan kerja	Ada	-	-	-
15	*Term Of Refference* (TOR) per kegiatan	Ada	-	-	-
16	Surat keterangan, berita acara penghapusan kendaraan	Ada	-	-	-
17	Data Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk mengetahui luas, jumlah dan kondisi BMD	Ada	-	Buku Inventaris BMD	-
18	Data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan	Ada	-	Dokumen RKBMD	-

2. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada RKPA SKPD yang tidak terdapat dalam PPAS Perubahan yang memenuhi kriteria kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada rancangan RKPA SKPD yang tidak terdapat dalam PPAS Perubahan	-	-	-
2	Penambahan kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dilengkapi denga BA Kesepakatan KD dengan Ketua DPRD	-	-	-

3. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pendapatan daerah
   a. PAD
      1) Pajak daerah provinsi
         a) Alokasi anggaran pajak daerah provinsi dalam RKPA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Target pajak kendaraan bermotor	-	Tidak	-
2	Target bea balik nama kendaraan bermotor	-	Tidak	-
3	Target pajak bahan bakar kendaraan bermotor	-	Tidak	-
4	Target pajak air permukaan	-	Tidak	-
5	Target pajak rokok	-	Tidak	-

         b) Besaran target pajak dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA PPAS Perubahan dan didukung dokumen yang memadai

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Besaran target pajak dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-
2	Penetapan target pajak daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, melalui: a. Dapatkan kertas kerja/dokumen yang dipersamakan terkait perhitungan potensi pajak daerah dari Kepala Bakuda	-	-	-

2

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	b. Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain: jumlah potensi pajak daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, data inflasi			

2) Retribusi

a) Alokasi anggaran retribusi daerah dalam RKPA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Target retribusi jasa umum	-	Tidak	-
2	Target jenis retribusi jasa usaha	-	Tidak	-
3	Target jenis retribusi jasa tertentu	-	Tidak	-

b) Penetapan target retribusi daerah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Besaran target retribusi daerah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-
2	Penetapan target retribusi daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, yaitu 1. Dapatkan kertas kerja/dokumen yang dipersamakan terkait perhitungan potensi retribusi daerah dari Kepala Bakuda 2. Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain: jumlah potensi pajak daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, data inflasi	-	-	-

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

a) Alokasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam RKPA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Target Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	tidak	-

b) Besaran target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Besaran target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-
2	Perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	-	-	-

4) Lain-lain PAD yang sah

a) Dapatkan target lain-lain PAD yang sah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Target hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	-	Tidak	-
2	Target hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	-	Tidak	-
3	Target hasil kerja sama daerah	-	Tidak	-
4	Target jasa giro	-	Tidak	-
5	Target hasil pengelolaan dana bergulir	-	Tidak	-
6	Target hasil pendapatan bunga	-	Tidak	-
7	Target hasil penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah	-	Tidak	-
8	Target penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat dari penyimpanan uang pada bank,	-	Tidak	-

3

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
	penerimaan dari kegiatan lainnya menyebabkan pendapatan daerah			
9	Target Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	Tidak	-
10	Target Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	Tidak	-
11	Target Pendapatan dari Pengembalian	-	Tidak	-
12	Target Pendapatan BLUD	-	Tidak	-

b) Besaran target lain-lain PAD yang sah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Besaran target lain-lain PAD yang sah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-
2	Perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	-	-	-

b. Pendapatan transfer

1) Transfer pemerintah pusat

a) Target transfer pemerintah pusat dalam RKPA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Target dana perimbangan	-	Tidak	-
2	Target dana insentif daerah	-	Tidak	-
3	Target otonomi khusus	-	Tidak	-
4	Target dana keistimewaan	-	Tidak	-
5	Target dana dekai	-	Tidak	-

b) Besaran transfer pemerintah pusat dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Besaran transfer pemerintah pusat dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-
2	Perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	-	-	-

2) Transfer antar daerah

a) Target transfer antar daerah dalam RKPA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Target pendapatan bagi hasil	-	Tidak	-
2	Target bantuan keuangan	-	Tidak	-

b) Besaran transfer antar daerah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU			
		SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Besaran transfer antar daerah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-	-
2	Perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	-	-	-	-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RKPA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Target hibah	-	Tidak	-
2	Target dana darurat	-	Tidak	-

4

2) Besaran lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU			
		SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Besaran lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-	-
2	Perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	-	-	-	-

4. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran belanja daerah

a) Rencana Belanja operasi dalam RKPA SKPD

(1) Rencana belanja operasi

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Belanja pegawai antara lain:			
	a. Gaji kepala daerah/wakil kepala daerah (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah)	-	Tidak	-
	b. Penghasilan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	-	Tidak	-
	c. Gaji aparatur sipil negara (ASN)	Ada	-	4.548.614.765,00
	d. Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN	Ada	-	5.703.276.378,00
	e. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	Tidak	-
	f. Insentif pemungutan retribusi daerah	-	Tidak	-
	g. Honorarium	Ada	-	223.506.250,00
2	Belanja barang dan jasa	Ada	-	8.832.173.868,00
3	Besaran belanja bunga	-	Tidak	-
4	Besaran belanja subsidi	-	Tidak	-
5	Jumlah besaran belanja hibah	-	Tidak	-
6	Besaran belanja bantuan sosial	-	Tidak	-

(2) Rencana belanja operasi dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan Perubahan KUA-PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Belanja operasi dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	Sesuai	-	-
2	Penelusuran kesesuaian belanja dengan dokumen pendukung TOR	-	-	-
3	Kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan jumlah kendaraan dinas sesuai dengan daftar BMD	Sesuai	-	-
4	Biaya pemeliharaan gedung/bangunan atau renovasi telah dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan biaya pemeliharaan/renovasi bangunan/gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
5	Besaran biaya operasi telah sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah	Sesuai	-	-
6	Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran *(output)* kegiatan telah memperhatikan asas kepatuhan dalam pengalokasian anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.	Sesuai	-	-

b) Rencana Belanja Modal dalam RKPA SKPD

(1) Dapatkan rencana belanja modal dalam RKPA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
Rencana belanja modal:				
1	Belanja tanah	-	Tidak	-
2	Belanja peralatan mesin	Ada	-	311.295.198,00
3	Belanja gedung dan bangunan	Ada	-	180.000.000,00

5

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	-	Tidak	-
5	Belanja aset tetap lainnya	Ada	-	92.169.000,00

(2) Recana belanja modal dalam RKPA SKD tidak sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Belanja modal dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	sesuai	-	-
2	Penelusuran kesesuaian belanja dengan dokumen pendukung TOR	-	-	-
3	Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran *(output)* kegiatan telah memperhatikan asas kepatuhan dalam pengalokasian anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.	-	-	-
	BELANJA TANAH			
1.	Perencanaan pengadaan tanah yang dibuat oleh satker, apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah didasaRKPAn usulan kuasa pengguna barang dan memperhatikan ketersediaaan LBMD/KIB, Laporan keuangan perangkat daerah yang ada pada badan/biro pengelola aset	-	-	-
2	Kesesuaian TOR, RAB dan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah	-	-	-
3.	Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung serta honorarium dengan standar biaya sesuai Peraturan Kepala Daerah tentang standar harga	-	-	-
	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	SPTJM Telah memuat:			
	a. Pernyataan telah memenuhi kelayakan teknis	-	-	-
	b. Ketersediaan dana bagi pelaksanaan kontrak tahun jamak yang bukan merupakan tambahan pagu	-	-	-
2	Kontrak tahun jamak, pastikan apakah atas permohonan kontrak tahun jamak telah mendapat persetujuan kepala daerah	-	-	-
3	Untuk pekerjaan yang membutuhkan pembebasan/pengadaan lahan seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tanah dalam jumlah besar antara lain bandara, pelabuhan, jalan, irigasi, transmisi listrik dan rel kereta api, pastikan SPTJM telah dilampiri:	-	-	-
	- Pernyataan bahwa pengguna anggaran akan menyelesaikan pengadaan/pembebasan lahan/tanah	-	-	-
	- Pernyataan bahwa pengguna anggaran akan menjaga	-	-	-
	- Pernyataan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pengadaan/pembebasan lahan/tanah tidak dapat dibebankan pada APBD kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	-	-	-
4	Apakah Telah terdapat perhitungan kebutuhan biaya	-	-	-

6

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.			
5	Apakah telah terdapat analisis kebutuhan mengenai rencana pengadaan gedung/ bangunan yang diusulkan oleh satuan kerja	-	-	-
6	Pastikan bahwa Dokumen pendukung yang diajukan:	-	-	-
	Dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun	-	-	-
	Tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang	-	-	-
	BELANJA PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR			
1	Jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh satuan kerja serta kondisinya dalam LBMD/KIB dengan jumlah jabatan dalam struktur organisasi satuan kerja tersebut	-	-	-
2	Untuk penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diusulkan biaya pemeliharaannya. Pastikan terdapat surat keterangan berupa berita acara penghapusan kendaraan/pelelangan	-	-	-
3	Untuk pengadaan kendaraan bermotor yang dibatasi, pastikan apakah terdapat surat izin dari pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementrian	-	-	-

c) Rencana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam RKPA SKPD

(1) Dapatkan rencana BTT

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Rencana BTT	-	Tidak	-

(2) Besaran BTT dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Besaran BTT dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-

d) Rencana Belanja transfer dalam RKPA SKPD

(1) Dapatkan rencana belanja transfer

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Rencana belanja transfer	-	Tidak	-
	a. Belanja bagi hasil provinsi ke kab/kota	-	Tidak	-
	b. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota kepada pemerintahan desa	-	Tidak	-
	c. Belanja Bantuan Keuangan			

7

(2) Besaran belanja transfer dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	Besaran belanja transfer dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-

5. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pembiayaan daerah

a) Kebijakan penerimaan pembiayaan

(1) Dapatkan besaran penerimaan pembiayaan daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	SILPA	-	Tidak	-
2	Pencairan dana cadangan	-	Tidak	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	Tidak	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	Tidak	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	Tidak	-
6	Penerimaan pembiayuaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	-	Tidak	-

(2) Yakinkan besaran penerimaan pembiayaan dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Besaran penerimaan pembiayaan dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-

b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan

(1) Dapatkan besaran pengeluaran pembiayaan daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo	-	Tidak	-
2	Penyertaan modal daerah	-	Tidak	-
3	Pembentukan dana cadangan	-	Tidak	-
4	Pemberian pinjaman daerah	-	Tidak	-
5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	-	Tidak	-

(2) Yakinkan besaran pengeluaran pembiayaan daerah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Besaran pengeluaran pembiayaan daerah dalam RKPA SKPD telah sesuai dengan KUPA-PPAS Perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-

Pangkalpinang, September 2024

Direviu oleh
Ketua Tim,

YUNIE ANASTASIA, S.E.
NIP.19810620201001200 8

Disetujui oleh
Pengendali Teknis,

ELI APRIYANTI, S.E.
NIP.198604172009032003

8

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Apresiasi
1.	Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/342/LHR/REV-ITDA/2023 perihal Laporan Hasil Reviu Rencana Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 : Rekomendasi: 1. Tidak Ada	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat dan pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.